

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Persekusi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Penulisan skripsi ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan beberapa undang-undang nasional seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasi sebagai persekusi dalam hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persekusi merupakan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur peraturan pidana umum dan pidana khusus terkait kualifikasi tindak pidananya. Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah yang menyebabkan tumpang tindih terhadap masing-masing peraturannya. Setiap perundang-undangan yang terkait dengan persekusi memiliki perbedaan masing-masing seperti bentuk perbuatan dan motif perbuatannya. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur secara khusus terkait persekusi demi kepastian hukum dalam suatu negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Persekusi, Pertanggungjawaban pidana, Persekusi

ABSTRACT

This thesis is titled "Persecution in Criminal Law In Indonesia". The writing of this thesis refers to the normative juridical research method by using a legal and conceptual approach that is associated with several national laws such as, Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court, Law Number 40 Year 2008 concerning the Elimination of Discrimination and Race, and Law Number 5 Year 2018 concerning Eradication of Criminal Terrorism. This study aims to determine the actions that are qualified as persecution in criminal law and criminal liability against perpetrators of persecution. This research shows that persecution is a criminal offense by fulfilling elements of general criminal rules and special crimes related to the qualification of criminal acts. In Indonesia, criminal liability for perpetrators there is still no specific regulation governing the imposition of criminal sanctions, so that liability is contained in separate regulations which cause overlapping of each of the regulations. Every legislation related to the persecution has different differences, such as the form of actions and motives for their actions. Based on this research, the government as a protector and guarantor of the rights of its citizens needs to specifically regulate persecution for the sake of legal certainty in a country.

Keywords: Criminal Acts of Persecution, Criminal Liability, Persecution